

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian yaitu mengenai Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan Dan Dampaknya Pada UMKM.

2.1.1 Literasi Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Literasi Keuangan

Menurut Herdinata & Pranatasari (2020:16) Literasi keuangan merupakan kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang. Adapun menurut Ismanto, Widiastuti, Muharam, Pangestuti, & Rofiq (2019:96) Literasi Keuangan adalah struktur bagi manusia berupa pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan dalam kegiatan yang mempengaruhi perilaku keuangan dan kesejahteraan keuangan.

Senada dengan kedua pengertian diatas, menurut Soetiono & Setiawan (2018:8) Literasi keuangan diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan manajemen. Terakhir, menurut Roestanto (2017:6) Literasi Keuangan adalah kemampuan untuk memahami pengetahuan serta keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa Literasi Keuangan adalah pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam meningkatkan perilaku dan kesejahteraan keuangan orang tersebut dalam mengelola sumber daya keuangannya.

2.1.1.2 Kategori Literasi Keuangan

Dalam survei yang pertama kali dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013, OJK melaksanakan edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat dan mengelompokan tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) Well literate (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- 2) Sufficient literate (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
- 3) Less literate (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- 4) Not literate (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2.1.1.3 Manfaat Literasi Keuangan

Adapun manfaat dari Literasi Keuangan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016) yaitu:

- 1) Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan serta memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik.
- 2) Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.
- 3) Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan.

Untuk lebih mengedukasi masyarakat agar semakin paham di bidang keuangan OJK merencanakan tiga pilar utama dalam program strategi nasional literasi. Pertama, mengedepankan program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. Kedua, berbentuk penguatan infrastruktur literasi keuangan dan ketiga, tentang pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau.

2.1.1.4 Indikator Literasi Keuangan

OECD International Network on Financial Education (2016) menyebutkan bahwa indikator dari Literasi Keuangan adalah:

- 1) Pengetahuan keuangan (*financial knowledge*),
- 2) Perilaku keuangan (*financial behaviour*),
- 3) Sikap keuangan (*financial attitude*).

Demikian halnya dengan pengukuran literasi keuangan menurut Widiyati (2018) pengukuran Literasi keuangan menggunakan indikator berikut :

- 1) Perilaku
- 2) Sikap
- 3) Pengetahuan

Sejalan dengan itu, Sanistasya, Rahardjo, & Iqbal (2019) juga menyebutkan indikator dari Literasi Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Perilaku
- 2) Keterampilan
- 3) Pengetahuan
- 4) Sikap

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan referensi diatas ialah perilaku, sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

2.1.2 Inklusi Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Inklusi Keuangan

Menurut Soetiono & Setiawan (2018) keuangan inklusif adalah seluruh usaha yang bertujuan untuk menghilangkan seluruh hambatan guna memanfaatkan konsep berbiaya rendah untuk memanfaatkan semua hambatan yang ada terhadap akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Adapun menurut Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017, Inklusi Keuangan yang memiliki arti ketersediaan akses bagi beberapa lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016, tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Inklusi Keuangan adalah sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Terakhir menurut, Wahid & Isaiyas (2014:54) Inklusif Keuangan merupakan suatu skema pembiayaan yang inklusif, dengan tujuan yang utama yaitu memberikan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Berdasarkan pernyataan-pernyataan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa Inklusi Keuangan merupakan ketersediaannya akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan jasa keuangan guna memenuhi kebutuhan dan kemampuan keuangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraanya.

2.1.2.2 Manfaat Inklusi Keuangan

Menurut Wahid & Isaiyas (2014:65), ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh masyarakat melalui sistem layanan inklusif keuangan, antara lain:

- 1) Akses, kemudahan para pelaku usaha dalam mengakses pinjaman permodalan secara otomatis akan membuka peluang usaha yang lebih luas lagi atau juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi bagi para pelaku usaha tersebut.
- 2) Terbukanya jaringan ke dalam sektor keuangan formal agar para masyarakat khususnya golongan menengah kebawah bisa mengakses bermacam-macam jenis pinjaman usaha dan juga memanfaatkan produk bank maupun asuransi dengan persyaratan yang relatif mudah.

- 3) Kemudahan mengakses layanan keuangan formal akan mengurangi pertumbuhan bank keliling atau rentenir di masyarakat yang biasanya mematok pengambilan pinjaman yang mahal dengan bunga yang tinggi, dan manfaat yang terakhir yaitu rekening yang telah dibuat masyarakat pada lembaga keuangan formal kedepannya bisa digunakan untuk berbagai keperluan yang sangat penting dan juga untuk menjalankan usaha.

2.1.2.3 Indikator Inklusi Keuangan

Soetiono & Setiawan (2018:107), menyebutkan indikator Inklusi Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Akses (*access*)
- 2) Penggunaan (*usage*)
- 3) Kualitas (*quality*)

Demikian halnya dengan pengukuran inklusi keuangan menurut SNLKI (2017:21) menyebutkan indikator Inklusi Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Akses
- 2) Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan
- 3) Penggunaan Produk dan Layanan Jasa Keuangan
- 4) Kualitas

Selain itu, menurut Sanistasya, Rahardjo, & Iqbal (2019) juga menyebutkan indikator dari Inklusi Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Akses
- 2) Kualitas

- 3) Penggunaan
- 4) Kesejahteraan

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan referensi diatas adalah akses, penggunaan, kualitas dan kesejahteraan.

2.1.3 Kinerja UMKM

2.1.3.1 Pengertian Kinerja

Menurut David (2012:58) kinerja merupakan tingkat pencapaian. Adapun menurut Menurut Mulyadi (2011) menyatakan kinerja adalah istilah umum yang digunakan untuk menunjukan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada satu periode. Menurut Afandi (2018:83) menyatakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara illegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kinerja adalah tingkat pencapaian suatu aktivitas dari organisasi dalam satu periode waktu tertentu.

2.1.3.2 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut N. Rianty & Sianipar (2021:12) UMKM adalah usaha kecil yang menjadi sarana bantuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Adapun menurut Handini, Sukesi, & Kanty (2019:19) UMKM merupakan suatu usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sejalan dengan itu menurut

Tambunan (2013: 2) UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Dalam FX. Adi Purwanto (2016:88) menyatakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha ekonomi kecil yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang dapat menjadi sarana dalam meningkatkan perkonomian bangsa.

2.1.3.3 Indikator Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kinerja UMKM merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas yang diminta. Sesuai dengan pernyataan dari Setyawati (2021:130) indikator kinerja UMKM adalah sebagai berikut :

- 1) Tumbuhnya penjualan
- 2) Tumbuhnya modal
- 3) Tumbuhnya tenaga kerja
- 4) Tumbuhnya pasar

Demikian dengan hal itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Samosir, Utama, & Marhaeni (2016) menunjukan bahwa indikator kinerja UMKM, yaitu :

- 1) Pertumbuhan penjualan
- 2) Pertumbuhan modal
- 3) Pertumbuhan tenaga kerja
- 4) Pertumbuhan laba

Adapun menurut indikator kinerja UMKM menurut Alamsyah (2020) adalah sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan volume penjualan
- 2) Pertumbuhan modal meningkat
- 3) Pertumbuhan profit

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Febriana & Sulhan (2021) menyebutkan indikator Kinerja UMKM adalah sebagai berikut :

- 1) Dimensi probabilitas
- 2) Dimensi pertumbuhan ekonomi
- 3) Dimensi pertumbuhan jumlah pegawai

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan referensi diatas adalah pertumbuhan penjualan, pertumbuhan modal, pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan laba atau profit.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kinerja merupakan suatu hal yang penting dalam suatu kegiatan usaha terutama UMKM, maka dari itu kinerja suatu usaha selalu diusahakan untuk terus meningkat. Peningkatan kinerja suatu usaha biasanya menjadi masalah yang seringkali terabaikan oleh para pelaku bisns. Hambatan-hambtan yang ditemui oleh para pelaku UMKM

biasanya akibat terbatasnya akses para UMKM terhadap bank, yang mengakibatkan penurunan modal yang dihasilkan oleh UMKM. Selain faktor inklusi, faktor literasi keuangan juga menjadi salah satu hal yang sering diabaikan oleh para pelaku usaha, padahal dengan meningkatkan kegiatan literasi diharapkan para pelaku usaha bisa memaksimalkan akses perbankan yang telah ada.

Dalam kerangka penelitian ini dijelaskan mengenai literasi keuangan terhadap inklusi keuangan dan dampaknya pada kinerja UMKM.

2.2.1 Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan

Memiliki pemahaman terhadap literasi keuangan memberikan dampak kepada bagaimana cara seseorang memanfaatkan berbagai fasilitas, fungsi dan resiko dari layanan jasa keuangan. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman seseorang terhadap inklusi keuangan dipengaruhi dari bagaimana cara orang tersebut memahami dengan baik apa itu literasi keuangan, karena literasi keuangan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan seseorang dalam membuat keputusan keuangan. Sesuai dengan pernyataan oleh Hidayat (2016:3) yang mengemukakan bahwa, literasi keuangan yang rendah merupakan persoalan serius karena bisa memberikan dampak *negative* terhadap perilaku keuangan seseorang.

Selain itu, adapun pernyataan oleh Soetiono & Setiawan (2018) yang mengemukakan bahwa, rendahnya tingkat literasi keuangan menciptakan hambatan masyarakat untuk mengakses produk keuangan. Rendahnya pengetahuan tentang mekanisme produk keuangan dan biayanya juga mengurangi kemungkinan

penggunaan produk dan layanan keuangan. Masalah yang sama juga akan mencegah individu memanfaatkan produk dan layanan keuangan mereka secara optimal.

Hal ini didukung dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh Pulungan & Ndruru (2019) yang menunjukkan bahwa Literasi Keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Inklusi Keuangan. Lalu, penelitian lainnya oleh Sari & Kautsar (2020) yang juga menunjukkan bahwa Literasi Keuangan memiliki efek positif terhadap Inklusi Keuangan. Serta, sejalan dengan penelitian dari Bire, Sauw, & Maria (2019) yang menunjukkan adanya dampak langsung dan signifikan dari Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan.

Berdasarkan premis-premis diatas, dapat dirumuskan bahwa hipotesis pertama (H_1) penelitian ini adalah adanya pengaruh Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan.

2.2.2 Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM

Pemahaman terhadap Inklusi Keuangan sangatlah penting untuk meningkatkan Kinerja UMKM. Keuangan inklusif membantu masyarakat dalam mengelola keuangan yang dimiliki dan memberikan kemudahan dalam mengakses jhilasa lembaga keuangan untuk memperlancar aktifitas sosial ekonomi (Warhono, Indrawati, & Qori'ah, 2018). Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Hamirul & Desiyanti (2020:9) efek positif dari inklusi keuangan tersebut dirasakan banyak orang, jika layanan keuangan yang tersedia menjangkau masyarakat luas termasuk UMKM. Dengan kata lain, semakin banyak orang yang dengan mudah mengakses layanan keuangan, semakin cepat juga ekonomi bertumbuh. Adapun pernyataan dari Hilmawati

& Kusumaningtias (2021) menyatakan bahwa inklusi keuangan dibutuhkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan kemudahan dalam setiap peningkatan proses bisnisnya.

Selain itu, pernyataan dari Soetiono & Setiawan (2018) menjelaskan bahwa Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya dalam meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat di dalam pemanfaatan layanan jasa keuangan dengan biaya terjangkau. Masyarakat sering mengalami kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan dikarenakan sulitnya persyaratan dari bank yang membuat pelaku usaha tidak dapat mengakses keuangan untuk modal usahanya. Persyaratan yang lebih sederhana dan akses yang lebih luas dari lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja keuangan dan partisipasi dari masyarakat di dalam perekonomian. Inklusi keuangan yang baik membuat pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya yang membuat kinerja keuangan dapat tumbuh.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmayanti & Devi (2021) yang menunjukkan bahwa Inklusi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hasil lainnya juga dikemukakan penelitian yang dilakukan oleh Kosim, Savitri, & Sindi (2021) yang menunjukkan bahwa variabel Inklusi Keuangan memiliki pengaruh terhadap Kinerja UMKM. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati (2020) yang menunjukkan adanya pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dari Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Setyowati, Rahadhini, & Sarwono (2022) yang juga menunjukkan hasil bahwa Inklusi Keuangan memiliki efek yang

signifikan terhadap Kinerja UMKM. Berdasarkan premis-premis diatas, dapat dirumuskan bahwa hipotesis pertama (H_2) penelitian ini adalah adanya pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM.

2.2.3 Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM

Bagi UMKM pengembangan kinerjanya merupakan hal yang penting untuk keberlangsungan usaha mereka. Untuk mengembangkan UMKM menjadi salah entitas yang berfondasi kuat, UMKM perlu sungguh memiliki kesadaran akan pentingnya literasi keuangan. Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Herdinata & Pranatasari (2020:6) bahwa lemahnya literasi keuangan inilah yang dapat membuat UMKM gagal berkembang. Selain itu, Herdinata & Pranatasari (2020:7) menjelaskan bahwa banyak pelaku UMKM yang belum memahami secara baik apa dan bagaimana literasi keuangan itu sangat berperan untuk pengembangan kinerja dan usaha mereka.

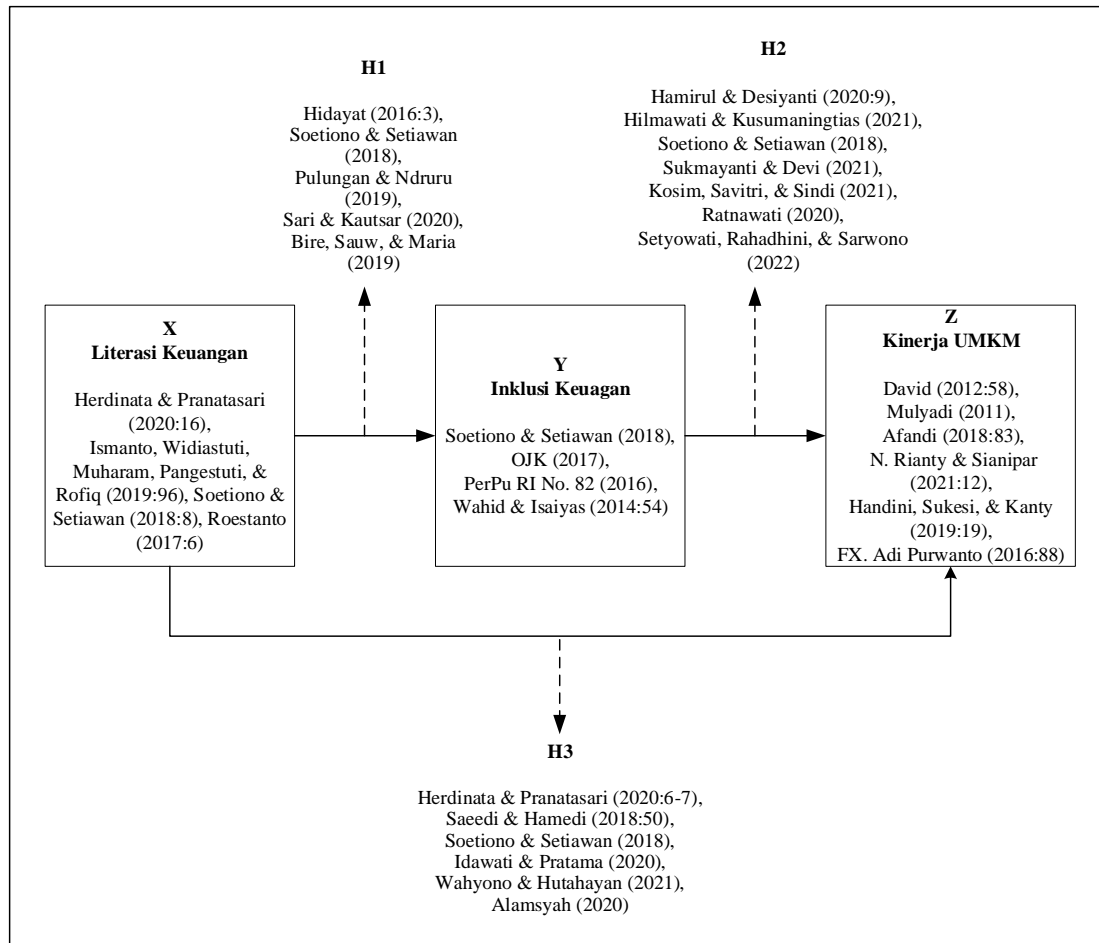
Adapun pernyataan yang dipaparkan oleh Saeedi & Hamed (2018:50) mengemukakan bahwa subkelompok tertentu termasuk wanita, Afrika-Amerika, Hispanik, segmen tertua dari populasi lanjut usia, dan mereka yang berpendidikan rendah, memiliki pengetahuan investasi yang lebih rendah daripada rata-rata populasi umum. Studi menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan dan mengingatkan pihak berwenang untuk lebih memperhatikan peningkatan literasi keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa tindakan mendesak diperlukan untuk melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan di antara semua investor.

Sejalan dengan itu, pernyataan dari Soetiono & Setiawan (2018) mengatakan bahwa literasi keuangan sangat penting bagi pengusaha UMKM karena literasi

keuangan dapat memberdayakan UMKM tentang sumber-sumber pendanaan dan keterampilan yang akan membekali UMKM untuk menimbang pilihan mereka dalam mencari pembiayaan untuk mengoptimalkan struktur keuangannya

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Idawati & Pratama (2020) yang menunjukkan hasil bahwa terjadi pengaruh yang signifikan antara Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM. Lalu, penelitian lainnya oleh Wahyono & Hutahayan (2021) yang mengkonfirmasi pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM. Hal ini berimplikasi bahwa dengan Literasi Keuangan yang baik, maka diharapkan UMKM mampu membuat keputusan manajemen dan keuangan yang tepat untuk memperbaiki kinerja dan inovasi. Sejalan dengan penelitian-penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah (2020) menunjukkan bahwa Literasi Keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan UMKM.

Berdasarkan premis-premis diatas, dapat dirumuskan bahwa hipotesis pertama (H_3) penelitian ini adalah adanya pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM. Berdasarkan premis-premis yang telah disebutkan diatas, maka paradigma penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara peneliti tentang penelitian yang sedang diteliti. Dugaan sementara tersebut dilandaskan atas dasar rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti. Hipotesis masih merupakan dugaan yang teoritis, karena belum terbukti secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Inklusi Keuangan.

H₂ : Inklusi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja UMKM.

H₃ : Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja UMKM.